

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia selalu berperilaku untuk mencari kebahagiaan, semua orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Menurut Aristoteles, kebahagiaan merupakan tujuan utama dari eksistensi manusia. Setiap manusia juga memiliki harapan-harapan yang ingin dicapai untuk memenuhi kepuasan dalam kehidupannya. Keduanya, kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup merupakan bagian dari konsep kesejahteraan subjektif yang mencakup aspek afektif dan kognitif manusia (Ningsih, 2013). Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan, pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan yang besar dalam suatu struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu suatu proses yang merupakan perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita, dan kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung terus menerus dalam jangka panjang (Hasan & Aziz, 2018). Secara ekonomi makro tujuan perkembangan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks masyarakat sebagai objek pembangunan, diperlukan suatu indikator untuk mengukur besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator keberhasilan suatu negara atau daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di setiap negara. Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomiyang dapat dicapai (Amri, 2017).

Pembangunan selalu dihubungkan dengan suatu perubahan kondisi kepada situasi dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah bahkan cenderung memiliki konotasi positif, yaitu suatu pertumbuhan dan masa depan yang lebih baik. Berbagai interpretasi juga dilontarkan dengan berbagai argument yang mampu menggiring pada pemikiran bahwa pembangunan selalu membawa kebaikan. Namun era globalisasi dan komunika mampu seolah membenarkan pemahaman tersebut. Kadang peningkatan pendapatan per kapita atau Gross Domestic Product (GDP) selalu dapat dijadikan ukuran pembangunan, padahal tidak jarang kesenjangan sosial juga sering mengiringi pembangunan apabila yang terjadi justru ketidakmerataan pendistribusiannya. Kemiskinan misalnya, menjadi salah satu bentuk kesenjangan yang ada di tengah-tengah proses pembangunan. Hal ini apabila ekonomi yang menjadi aspek dalam melihat pembangunan. Hal tersebut juga disebabkan industrialisasi, perkembangan teknologi yang terjadi selain proses modernisasi masyarakat, namun bagi yang tidak memiliki akses terhadap aset-aset produksi serta keterbatasan pilihan dan kesempatan, maka terjadilah kemiskinan, kelaparan, malnutrisi, keterpinggiran budaya, dan sisi-sisi negatif lainnya yang padakenyataannya ada dan menjadi fenomena nyata di tengah pertumbuhan ekonomi yang dibilang pesat.

Kebahagiaan merupakan bagian dari kesejahteraan, dan kebahagiaan yang lebih besar dapat memperbesar kapabilitas manusia untuk berfungsi. Menurut Furnham (2008) kebahagiaan merupakan bagian kesejahteraan, *contentment, to do your life satisfaction or equally the absence of psychology distress*. Kebahagiaan yang merupakan sesuatu yang pencapaian tujuannya dikarenakan kebahagiaan selalu dihubungkan dengan kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi serta tempat kerja yang lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang membuat individu memiliki perasaan senang, damai, dan termasuk juga didalamnya kesejahteraan, kedamaian pikiran, dan kepuasan hidup. Amartya Sen (dalam Todaro dan Smith, 2011) mengemukakan bahwa dalam pengertian kebahagiaan, utilitas dapat dicakup dengan baik dalam daftar beberapa keberfungsian yang penting dan relevan dengan kesejahteraan seseorang. Menurut (Todaro dan Smith, 2011) kesejahteraan manusia berarti

menjadi baik, yang dalam pengertian dasar berarti sehat, menyantap makanan yang bernutrisi, berpakaian pantas, melek aksara, dan panjang umur. (Helliwell, 2013) juga berpendapat bahwa kebahagiaan merupakan bagian dari kesejahteraan manusia. Pengertian yang lebih luas menjadi lebih baik berarti mampu mengambil bagian atau berkiprah dalam kehidupan masyarakat, leluasa bergerak, dan memiliki kebebasan memilih untuk menjadi orang yang diinginkan lalu dapat melakukan apa saja yang mungkin dapat dilakukan.

Kebahagiaan menurut Lyubomirsky (2005) disebabkan oleh tiga faktor yakni faktor genetik (set range), keadaan atau situasi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu (circumstances) dan hal-hal yang dikendalikan atau kegiatan yang disengaja (voluntary activities). Kehidupan dalam memperoleh kebahagiaan seperti diri sendiri, keluarga, waktu, kesehatan, keuangan dan pekerjaan. Dengan demikian keuangan dan pekerjaan merupakan domain kebahagiaan yang menggambarkan status ekonomi.

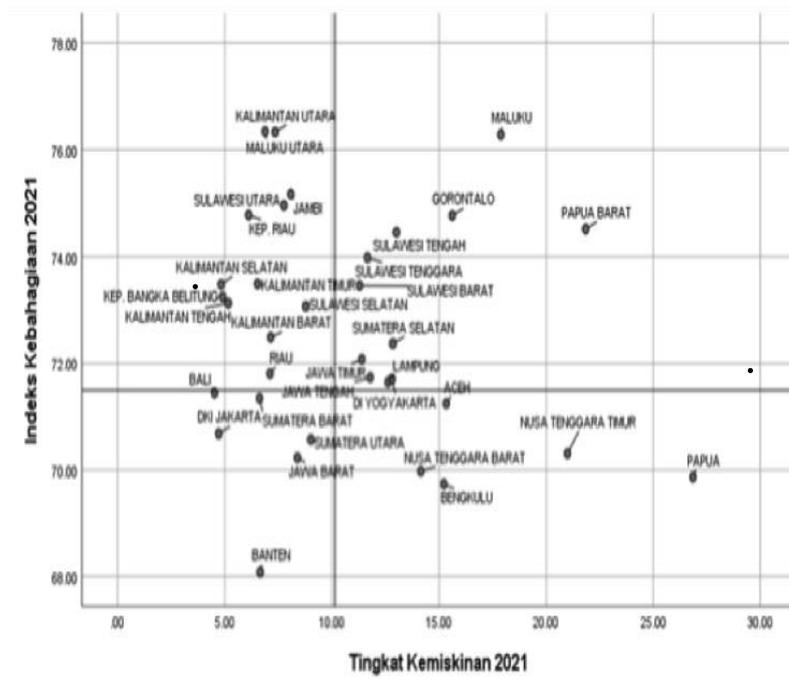
Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan dua cara, yaitu menggunakan standar yang sama (indikator objektif) dan menggunakan standar yang tidak sama (indikator subjektif). Salah satu indikator kesejahteraan yang mengukur capaian berdasarkan standar yang tidak sama untuk masing-masing individu adalah indeks kebahagiaan (Badan Pusat Statistik). Perkembangan indeks kebahagiaan Indonesia, rata-rata tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar 70,69 pada skala 0-100. Kondisi kehidupan penduduk Indonesia dapat dikatakan cukup bahagia pada tahun 2017, karena rata-rata indeks kebahagiaan tahun 2017 sudah diatas 50.

Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusunan indeks kebahagiaan Indonesia, yaitu : (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 71,07, (2) Indeks Dimensi Perasaan sebesar 68,59, dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup sebesar 72,23. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100, indeks dimensi makna hidup diatas angka 50 dan mendekati angka 100 menunjukkan penilaian penduduk yang semakin dapat memaknai hidupnya dengan baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Indeks Kebahagiaan, 2017). Indeks Dimensi Kepuasan Hidup di atas angka 50 dan mendekati angka 100 menunjukkan penilaian penduduk yang semakin puas

dengan kondisi objektif domain kehidupannya, demikian sebaliknya. Selanjutnya, Indeks Dimensi Perasaan di atas angka 50 dan mendekati angka 100 menunjukkan penilaian penduduk yang semakin sensitif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terakhir, Indeks Dimensi Makna Hidup di atas angka 50 dan mendekati angka 100 menunjukkan penilaian penduduk yang semakin dapat memaknai hidupnya dengan baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Menurut Easterlin (1974), tingkat kebahagiaan tidak ditentukan dari tingkat pendapatan seseorang. Nampaknya hal ini juga sejalan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Kebahagiaan subjektif tidak selalu berkaitan dengan status ekonomi. Ada banyak cara dalam menemukan kebahagiaan yang tidak selalu berhubungan dengan pendapatan. Dengan demikian, orang miskin tetap bisa bahagia. Beberapa hal yang dianggap sebagai kemiskinan dalam satu konteks mungkin tidak dalam konteks lainnya, seperti orang-orang yang berpendapatan rendah dibawah rata-rata namun berkumpul dan harmonis dalam keluarga merasa sudah bahagia. Namun, sebagian orang yang berpenghasilan lebih dari rata-rata tapi tidak harmonis dalam keluarga tidak merasakan kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi mungkin bisa membeli kemampuan untuk mengukurnya. Jadi perlu meningkatkan indikator sosial untuk membuat masyarakat bahagia (Srivastava & Deo, 2016:708).

Dalam konteks masyarakat sebagai objek pembangunan, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu indikator kesejahteraan adalah indeks kebahagiaan. Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran dalam pembangunan. Selain itu, kemiskinan juga merupakan hal yang berkaitan dengan kebahagiaan. Kondisi ekonomi yang rendah tidak selalu menyebabkan seseorang tidak bahagia. Beberapa orang menganggap bahwa kebahagiaan sangat berhubungan dengan materi. Semakin banyak harta yang dimiliki semakin bahagia. Kebahagiaan itu bukan selalu materi melainkan ketika tercapainya kepuasan diri akan suatu pencapaian diri sejati melalui kreatifitas (Ashari, 2016).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 1 Indeks Kebahagiaan dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2021

Hubungan antara Indeks Kebahagiaan dengan tingkat kemiskinan dapat digambarkan dalam analisis kuadran. Setiap kuadran menunjukkan keterkaitan antara besaran persentase penduduk miskin dengan Indeks Kebahagiaan. Kuadran I menunjukkan daerah dengan persentase penduduk miskin dan Indeks Kebahagiaan penduduk yang relatif tinggi. Kuadran II menunjukkan provinsi dengan persentase penduduk miskin yang relatif rendah dan Indeks Kebahagiaan yang relatif tinggi. Sementara itu, kuadran III menggambarkan daerah dengan persentase penduduk miskin dan Indeks Kebahagiaan yang relatif rendah. Sementara Kuadran IV menunjukkan wilayah dengan persentase penduduk miskin yang relatif tinggi dan Indeks Kebahagiaan yang relatif rendah.

Provinsi-provinsi di Indonesia sebagian besar berada pada kuadran I dan II. Di satu sisi, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pola yang semestinya di sebagian besar wilayah, yakni daerah yang ternyata memiliki persentase penduduk miskin relatif rendah diiringi dengan tingkat kebahagiaan penduduknya yang relatif

tinggi dan sebaliknya. Salah satu provinsi yang termasuk dalam kuadran II adalah Kalimantan Utara, yaitu tercatat memiliki kesejahteraan yang lebih baik (persentase kemiskinan relatif rendah dari provinsi yang berada pada kuadran III dan IV) dan Indeks Kebahagiaan yang relatif tinggi. Di lain pihak, kuadran I menunjukkan pola hubungan yang berbeda. Daerah yang ternyata memiliki persentase penduduk miskin relatif tinggi memiliki tingkat kebahagiaan penduduk yang justru tinggi pula. Salah satu provinsi yang termasuk dalam kuadran I adalah Papua Barat, yang tercatat memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi serta memiliki Indeks Kebahagiaan yang relatif tinggi.

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan tidak selalu berhubungan dengan tingkat kebahagiaan. Menurut Easterlin (1974), tingkat kebahagiaan tidak ditentukan dari tingkat pendapatan seseorang. Nampaknya hal ini juga sejalan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Kebahagiaan subjektif tidak selalu berkaitan dengan status ekonomi. Ada banyak cara dalam menemukan kebahagiaan yang tidak selalu berhubungan dengan pendapatan. Dengan demikian, orang miskin tetap bisa bahagia.

Seperti kemiskinan, pengangguran merupakan kondisi yang juga sering dipandang sebagai hal yang negatif. Hal ini wajar karena di Indonesia orang yang bekerja biasanya merupakan sumber pendapatan keluarga. Sehingga, orang yang kehilangan pekerjaan atau menjadi pengangguran akan berdampak hilangnya pendapatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut dan juga keluarganya. Hilangnya pendapatan ini dapat memicu rasa ketidakbahagiaan seseorang. Tetapi tidak semua orang yang menganggur merasa tidak bahagia. Menurut Hoang & Knabe (2021), menyampaikan bahwa para penganggur menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersantai dan melakukan kegiatan yang lebih menyenangkan sehingga menganggur tidak terlalu mempengaruhi kebahagiaan.

Untuk meningkatkan IPM dalam suatu negara, maka negara tersebut harus meningkatkan tiga indikator dasar yang ada di dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu pendidikan, umur panjang atau kesehatan dan standar hidup yang

layak. Jika kita perhatikan sebenarnya ketiga aspek tersebut sebenarnya sudah termasuk di dalam aspek-aspek untuk mengukur indeks kebahagiaan, yaitu sudah masuk di dalam aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga serta kondisi rumah dan asset seperti yang dijelaskan oleh UNDP (Human Development Report, 1996). Maka dari itu ketika skor IPM suatu negara meningkat maka akan mempengaruhi tingkat indeks kebahagiaan negara tersebut. Dan jika suatu negara ingin meningkatkan skor IPM negaranya maka dengan melakukan beberapa pendekatan dengan menggunakan aspek-aspek indeks kebahagiaan sebagai dasarnya akan mempercepat potensi meningkatnya skor IPM negara tersebut, karena semua aspek-aspek tersebut berada di dalam aspek-aspek indeks kebahagiaan.

Kekayaan dan kesejahteraan subjektif merupakan isu utama dalam penelitian ilmu sosial. Studi yang masih ada telah menemukan hubungan yang kompleks antara pendapatan dan kebahagiaan. Misalnya, ada bukti bahwa uang tidak selalu bisa membeli kebahagiaan. Setelah kekayaan materi mencapai tingkat tertentu, peningkatan lebih lanjut tidak lagi meningkatkan kebahagiaan (Easterlin, 1973, 1974, 1995). Kesimpulan ini, juga disebut "paradoks Easterlin" (yaitu, lebih banyak kekayaan tidak mengarah pada lebih banyak kebahagiaan), mungkin berasal dari kepuasan individu dengan kehidupan mereka yang agak dipengaruhi oleh perbandingan spontan mereka antara diri mereka sendiri dan orang lain. Menurut teori perbandingan sosial (Festinger, 1954), ada dua jenis perbandingan sosial: perbandingan ke atas, yang melibatkan membandingkan diri sendiri dengan mereka yang melakukan lebih baik, dan perbandingan ke bawah, yang melibatkan membandingkan diri sendiri dengan mereka yang melakukan lebih buruk. Secara kritis, kecenderungan perbandingan ke atas secara signifikan lebih kuat daripada perbandingan ke bawah (Ferrer-i-Carbonell, 2005; Boyce et al., 2010). Akibatnya, bahkan jika pendapatan absolut mereka meningkat, individu masih cenderung membandingkan diri mereka dengan mereka yang lebih kaya, yang dapat memperburuk kesejahteraan subjektif mereka.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin memburuk sejalan dengan kecenderungan semakin parahnya tingkat kemiskinan. Hal ini dikaitkan dengan

pola pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Semakin timpang dan tidak merata, maka kemiskinan semakin tinggi, yang menyebabkan kecenderungan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan tingkat kebahagiaannya. Dalam konteks Indonesia, kesenjangan pendapatan yang terjadi tidak secara langsung mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Namun demikian, pemerintah tetap harus berusaha mengurangi adanya kesenjangan tersebut agar tercipta pemerataan pembangunan nasional (Wibowo, 2016).

Apabila suatu wilayah semakin timpang maka dapat mempresentasikan adanya perbedaan pendapatan yang besar di masyarakat dan partisipasinya terhadap tingkat kebahagiaan semakin rendah. Ketimpangan pendapatan terjadi akibat tidak meratanya perekonomian seperti pusat-pusat perekonomian lebih banyak di kota dibandingkan di desa sehingga kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di kota, sebab lain seperti, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang jasa, dan tenaga kerja sehingga usaha untuk mengurangi ketimpangan pendapatan bisa dilakukan seperti pemberdayaan ekonomi lokal dengan lebih mengedepankan produk-produk domestik dan tidak menjamurnya supermarket menjadi suatu usaha untuk lebih pemeratakan pendapatan masyarakat.

Tabel 1. 1 Capaian Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2014, 2017, dan 2021

No	Provinsi	2014	2017	2021
1	Aceh	67,48	71,96	71,24
2	Sumatera Utara	67,65	68,41	70,57
3	Sumatera Barat	66,79	72,43	71,34
4	Riau	68,85	71,89	71,80

5	Jambi	71,10	70,45	75,17
6	Sumatera Selatan	67,76	71,98	72,37
7	Bengkulu	67,43	70,61	69,74
8	Lampung	67,92	69,51	71,64
9	Kep. Bangka Belitung	68,45	71,75	73,25
10	Kep. Riau	72,42	73,11	74,78
11	DKI Jakarta	69,21	71,33	70,68
12	Jawa Barat	67,66	69,58	70,23
13	Jawa Tengah	67,81	70,92	71,73
14	DI Yogyakarta	70,77	72,93	71,70
15	Jawa Timur	68,70	70,77	72,08
16	Banten	68,24	69,83	68,08
17	Bali	68,46	72,48	71,44
18	Nusa Tenggara Barat	69,28	70,70	69,98
19	Nusa Tenggara Timur	66,22	68,98	70,31
20	Kalimantan Tengah	70,01	70,85	73,13
21	Kalimantan Barat	67,97	70,08	72,49
22	Kalimantan Selatan	70,11	71,99	73,48
23	Kalimantan Timur	71,45	73,57	73,49
24	Kalimantan Utara	0	73,33	76,33
25	Sulawesi Utara	70,79	73,69	74,96
26	Sulawesi Tengah	67,92	71,92	74,46
27	Sulawesi Selatan	69,80	71,91	73,07
28	Sulawesi Tenggara	68,66	71,22	73,98
29	Gorontalo	69,28	73,19	74,77
30	Sulawesi Barat	67,86	70,02	73,46
31	Maluku	72,12	73,77	76,28
32	Maluku Utara	70,55	75,68	76,34
33	Papua Barat	70,45	71,73	74,52
34	Papua	60,97	67,52	69,87
35	Indonesia	68,28	70,69	71,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014, 2017, dan 2021

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa hasil tiga kali survey pada tahun 2014, 2017, dan 2021 Indeks Kebahagiaan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014 Indeks Kebahagiaan tercatat sebesar 68,28%, kemudian 2017 sebesar 70,69%, dan 2021 sebesar 71,49%. Jika dilihat berdasarkan sebaran daerah, masyarakat dengan tingkat kebahagiaan tertinggi berada di luar Jawa-Bali. Dari survey 2021, provinsi dengan Indeks Kebahagiaan tertinggi secara berurutan ialah Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Indeks Kebahagiaan di Pulau Sumatera berdasarkan 10 domain, yaitu : pendidikan sebesar 62,79;

pekerjaan 72,37; pendapatan rumah tangga 66,76; kesehatan 76,28; rumah dan asset 75,64; keharmonisan keluarga 82,56; ketersediaan waktu luang 75,87; hubungan sosial 79,10; keadaan lingkungan 81,56; keamanan 81,20.

Indonesia merupakan negara yang memiliki 6 pulau. Salah satu pulau yang perlu diperhatikan untuk dilakukan perbaikan dalam upaya peningkatan kebahagiaan penduduk yaitu Pulau Sumatera, hal ini dikarenakan masih banyaknya Provinsi di Pulau Sumatera yang pencapaian indeks kebahagiaannya dibawah rata-rata angka nasional. Sumatera adalah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia dengan luas 473.481 km². Penduduk pulau ini sekitar 57.940.351, terdapat 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pencapaian indeks kebahagiaan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014, 2017, dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Indeks Kebahagiaan Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2014, 2017, dan 2021

No	Provinsi	2014	2017	2021
1	Aceh	67,48	71,96	71,24
2	Sumatera Utara	67,65	68,41	70,57
3	Sumatera Barat	66,79	72,43	71,34
4	Riau	68,86	71,89	71,80
5	Jambi	71,10	70,45	75,17
6	Sumatera Selatan	67,76	71,98	72,37
7	Bengkulu	67,43	70,61	69,74
8	Lampung	67,92	69,51	71,64
9	Kep. Bangka Belitung	68,45	71,75	73,25
10	Kep. Riau	72,42	73,11	74,78
	Rata-Rata	68,58	71,21	72,19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014, 2017, dan 2021

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Kebahagiaan di Pulau Sumatera pada tahun 2014 sebesar 68,58%, pada tahun 2017 sebesar 71,21%, dan 2021 sebesar 72,19%. Selama periode 2014-2021 pertumbuhan indeks kebahagiaan di beberapa Provinsi mengalami penurunan. Provinsi dengan pertumbuhan indeks kebahagiaan yang menurun antara lain Aceh sebesar 0,72%, Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 1,09%, dan Provinsi Bengkulu mengalami

penurunan sebesar 0,87%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kebahagiaan penduduk di Pulau Sumatera belum merata dapat dirasakan oleh beberapa Provinsi.

Pembangunan negara erat kaitannya dengan ketimpangan yang ada di suatu negara. Ketika kemiskinan tinggi tentunya hal ini berdampak pada sejahteranya suatu negara (Wibowo, 2016). Aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seringkali dikaitkan dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Pengangguran seringkali menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak maksimal sehingga dapat menghambat tujuan dari pembangunan itu sendiri. Jika tingkat pengangguran di suatu negara tinggi maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan berkurang, dan tingkat daya beli juga akan menurun, serta pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga tidak terpenuhi sehingga kesejahteraannya tidak dapat dicapai.

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat meliputi semua bentuk intervensi sosial dengan tujuan utama pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat yaitu terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi, yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Menjadikan IPM sebagai salah satu variabel untuk mengukur seberapa besar kebahagiaan yang ada dalam suatu negara, karena kebahagiaan saat ini yang menjadi tujuan adalah seberapa bahagianya dalam diri manusia. IPM yang membahas seberapa besar kualitas seseorang yang nantinya akan mempengaruhi seseorang untuk terjun di dunia kerja serta sosial di masyarakat. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka

melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan, dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Kusaefi & Shafey, 2015).

Tabel 1. 3 Rata-Rata Indeks Kebahagiaan, Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2014, 2017, dan 2021

No	Provinsi	Indeks Kebahagiaan	Kemiskinan	Pengangguran	IPM	Indeks Gini
1	Aceh	70,22	16,14	7,29	72,19	0,35
2	Sumatera Utara	68,87	9,20	6,05	70,48	0,34
3	Sumatera Barat	79,18	6,56	6,2	71,08	0,32
4	Riau	70,85	7,46	5,73	71,68	0,36
5	Jambi	72,24	7,98	4,68	69,95	0,35
6	Sumatera Selatan	70,70	13,17	4,77	68,61	0,50
7	Bengkulu	69,26	15,70	3,62	69,88	0,37
8	Lampung Kep.	69,69	12,97	4,57	68,19	0,36
9	Bangka Belitung	71,15	4,98	4,65	69,98	0,28
10	Kep. Riau	72,57	6,09	7,92	75,54	0,39
Rata-Rata		71,47	10,02	5,54	70,75	0,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014, 2017, dan 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebahagiaan masyarakat di Pulau Sumatera melalui kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “ Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Indeks Kebahagiaan di Pulau Sumatera ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan indeks kebahagiaan, kemiskinan, pengangguran, IPM, dan ketimpangan pendapatan terhadap Indeks Kebahagiaan di Pulau Sumatera ?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan, pengangguran, IPM, dan ketimpangan pendapatan terhadap Indeks Kebahagiaan di Pulau Sumatera ?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perkembangan angka indeks kebahagiaan, kemiskinan, pengangguran, IPM, dan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.
2. Menganalisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, IPM, dan ketimpangan pendapatan terhadap Indeks Kebahagiaan di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu 1) sebagai sumber informasi tambahan ilmu ekonomi, Sumber Daya Manusia dan kependudukan, 2) sebagai tambahan referensi untuk pengembangan ilmu ekonomi atau masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan indeks kebahagiaan.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu 1) untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan, 2) untuk stake holder terkait dengan penelitian ini.